

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengakuan aset tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Surat Perintah Kerja (SPK) yang menjadi dasar dalam perolehan aset tetap menggunakan nilai perolehan karena saat pembuatan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang sudah menghitung semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap itu diperoleh.
2. Pengukuran aset tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang mengenai penilaian awal, penyusutan dan Penghentian dan pelepasan aset tetap sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
3. Pengungkapan aset tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Namun mengenai informasi metode penyusutan yang digunakan untuk melakukan penyusutan aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang belum diungkapkan pada Laporan Keuangan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

4. Penyajian aset tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya maka saran yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang diharapkan lebih terperinci dalam menyediakan data yang berkaitan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan menyertakan biaya-biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap diperoleh agar saat pengakuan ataupun penilaian awal aset tetap yang diperoleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang dapat mengetahui aset tetap yang diperoleh tersebut diperoleh berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang diharapkan dapat mengungkapkan metode penyusutan yang digunakan untuk melakukan penyusutan terhadap aset tetap dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
3. Mengenai penghentian dan pelepasan aset tetap ada atau tidaknya penghentian dan pelepasan aset tetap diharapkan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) .
4. Sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang dalam laporan keuangan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) lebih terperinci dalam menjelaskan pos-pos aset tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar Tipan, 2016. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara. Fakultas ekonomi dan Bisnis. Universitas Ratulangi Manado: Sulawesi Utara
- Andriyani Lysa 2008. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Daerah Dalam Penyusunan Neraca Pada Pemerintah Kabupaten Jember. Universitas Brawijaya. Malang.
- Auliana, 2014. Analisis Akuntansi Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjung Pinang Berdasarkan Pernyataan Standar akuntansi Pemerintahan No.07 (tidak dipublikasikan). Fakultas ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji: Tanjungpinang
- BPKP. (2002). Modul Pelatihan Dasar-Dasar Akuntansi 1. Jakarta : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Prov. NTT Tahun 2020*. (2022). <http://www.bpk.go.id>. Di akses pada tanggal 4 April 2022.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kupang Tahun 2020*. (2022). <http://www.bpk.go.id>. Di akses pada tanggal 4 April 2022.
- Bahgieni Isma, Muhammad Saleh, 2019. Analisis Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya Berdasarkan PSAP No 07 Terhadap Aset Tetap Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Di Kab. Aceh Tengah. Fakultas ekonomi dan Bisnis. Universitas Syiah Kuala: Aceh Tengah
- Dedi. 2012. Wiratna Akuntansi sektor publik. Pengertian akuntansi pemerintah.
- Halim, Abdul. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta.
- Harahap, S. 2011. Teori Akuntansi.. Edisi Revisi Penerbit. Rajawali Pers Rajawali
- Harrison Jr., Walter T., et al. 2012. *Akuntansi Keuangan IFRS Edisi Kedelapan* Jakarta :Salemba *Jilid 1*. Jakarta: Erlangga Keuangan, Penerbit : Erlangga, Jakarta

- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2011, Metodologi Penelitian Bisnis dan Akuntansi Manajemen. BPFE. Yogyakarta Ismail. 2010. Akuntansi Bank. PT Kencana, Surabaya.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2012. Buletin Teknis nomor 15 tentang Aset Tetap
- Kustadi, Arinta. 2009. Pengantar Akuntansi Pemerintahan. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Lysa Dwi Andriyai (2008). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Daerah dalam penyusunan Neraca Pada Pemerintah Kabupaten Jember. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Masipaung, Y. Ilat, V. Pinatik, S. 2015. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Manado. E-Journal Unsrat. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- MeigisandaTrias, 2016. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Dalam Penyusunan Neraca Pada Pemerintahan Kabupaten Madiun.
- Mislina (2013). Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang. Fakultas Ekonomi Universitas Maritim.
- Nur Fitriana Wati, 2014. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Fakultas ekonomi dan Bisnis. Universitas Airlangga: Jawa Timur
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Akuntansi Dasar dan Aplikasi Dalam Bisnis*. Jakarta : Indeks
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 pernyataan No. 7 tentang Akuntansi Aset Tetap.
- Raja Ali Haji Tanjung pinang Nordiawan, Deddi, Putra, Sondi I. Rahmawati, Maulida. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta.
- Raja Ali Haji Tanjungpinang. Bahtiar Arif, Muchlis, Iskandar. 2010. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta.

Rudianto, 2012, *Pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan Laporan*

Risca Kurniawati, 2013. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Kementerian Pekerjaan Umum

SAP Nomor 71 Tahun 2010, Kebijakan Akuntansi Aset Tetap